

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Silpa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fani Anggraeni Putranti^{1*}, Fajar Syaiful Akbar²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

* E-mail: putrantifani@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 24-08-2026

Revision: 30-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.759

ABSTRAK

Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2022-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, SILPA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD melalui pengelolaan sumber penerimaan daerah yang lebih efektif agar ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar daerah dapat dikurangi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kinerja Keuangan, Regresi Data Panel

ABSTRACT

Local governments with strong financial performance will have a greater capacity to provide public services, implement sustainable development, and reduce their reliance on transfer funds from the central government.. This study aims to examine the influence of Locally-Generated Revenue (PAD) and the Budget Financing Surplus (SILPA) on the financial performance of regency/city local governments in East Java Province during the 2022-2024 period. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from local government financial reports. Analysis was conducted using panel data regression with the aid of EViews 13 software. Based on model selection tests specifically the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test the Random Effect Model (REM) was selected for this study. The results indicate that Locally-Generated Revenue (PAD) has a positive and significant effect on local government

Acknowledgment

financial performance. Conversely, the Budget Financing Surplus (SILPA) does not show a significant effect on local government financial performance. Simultaneously, PAD and SILPA significantly influence local financial independence. Therefore, local governments need to optimize PAD through more effective management of local revenue sources to reduce reliance on external funding sources.

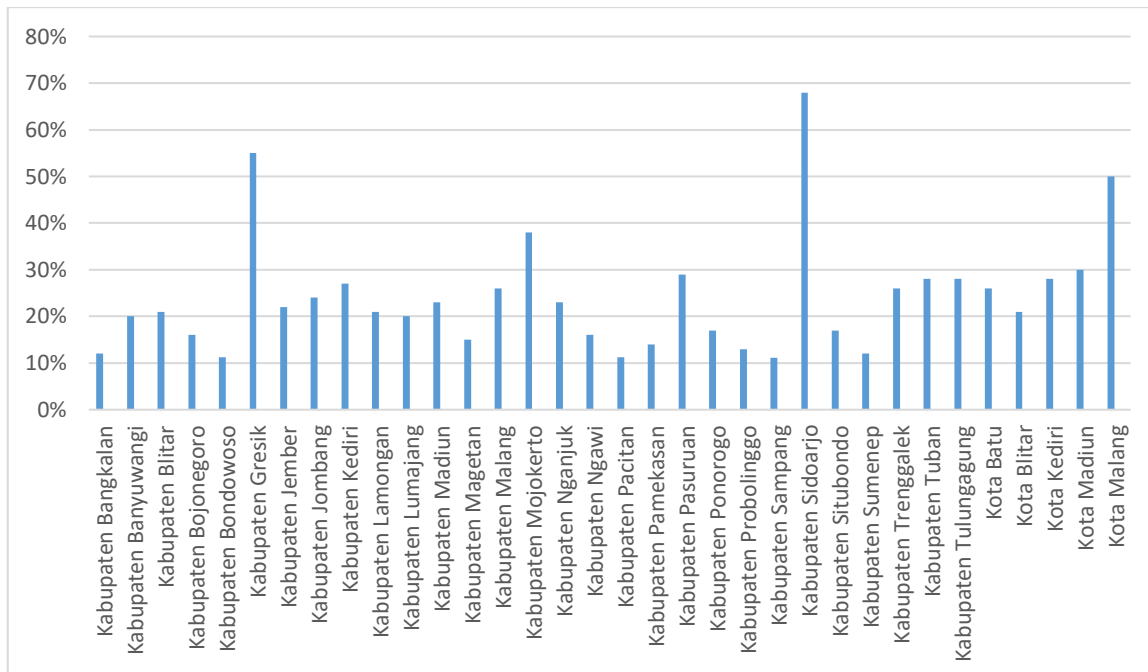
Key word: *Locally Generated Revenue, Budget Financing Surplus, Financial Performance*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan tersebut memberikan tanggung jawab kepada setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, mengalokasikan belanja secara efektif, serta mengelola anggaran secara akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin pada kinerja fiskal administrasi daerah, yang menunjukkan kapasitas untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat (Rahman & Saputra, 2022).

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: data diolah (2026)

Provinsi Jawa Timur termasuk daerah dengan jumlah kabupaten dan kota yang relatif banyak di Indonesia. Namun, kemandirian keuangan pemerintah daerah di provinsi ini masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar kabupaten dan kota. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP-K) Tahun 2022, sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki rasio kemandirian keuangan pada kisaran 10% hingga 30%. Bahkan, Kabupaten Sampang hanya mencatat rasio kemandirian sebesar 11,18%, Kabupaten Pacitan sebesar 11,24%, dan Kabupaten Bondowoso sebesar 11,29%. Sebaliknya, hanya beberapa daerah, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, yang mampu mencapai tingkat kemandirian keuangan relatif tinggi. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal antarpemerintah daerah di Jawa Timur masih belum merata, sehingga sebagian besar daerah masih harus bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dalam perbaikan dan perubahan kemampuan fiskal dan kemandirian pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber tersebut dapat mencerminkan sejauh mana potensi ekonomi daerah mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan. Peningkatan PAD juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah

pusat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal organisasi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya administrasi dan pembangunan secara memadai (Mulia & Widiatmoko, 2025). Selain PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) turut menjadi komponen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SILPA merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto pada suatu tahun anggaran. Keberadaan SILPA dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah. Namun, SILPA yang berlebihan dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan efisiensi maksimal, misalnya akibat perencanaan kegiatan yang kurang tepat atau adanya anggaran yang belum terealisasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dan turut berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk menjalankan tugas serta mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan yang telah ditetapkan. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam sektor publik, masyarakat dapat diposisikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah merupakan agen yang memperoleh mandat untuk mengelola sumber daya publik. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan tersebut kepada masyarakat. Teori keagenan diperlukan untuk menjelaskan hubungan PAD, SILPA, dan kinerja keuangan. Kemudian pemerintah daerah sebagai agen diharapkan mampu mengoptimalkan sumber pendapatan daerah serta mengelola anggaran secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas berbagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Saputra dan Kurniawati (2026), Angraini dan Hidayat (2023), Pradana dan Handayani (2023), serta Hastuti dan Nasution (2024) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, penelitian Azhar (2021), Rustiyani dan Barus (2023) dan Aryasandi dan Akbar (2024) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada variabel SILPA, penelitian Fitriani dan Syarif (2025), Ratnasari dan Meirini (2022) menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian Putri dan Ratnawati (2023) menunjukkan bahwa SILPA tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong perlunya pengujian kembali pengaruh PAD dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada objek dan periode data yang lebih baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Populasi pada penelitian terdiri atas 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, yang meliputi 29 kabupaten dan 9 kota. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyediakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara berturut-turut selama periode 2022-2024. Berdasarkan kriteria sampel, diperoleh 32 pemerintah daerah dengan total 96 observasi. Setelah dilakukan identifikasi dan penanganan terhadap 4 data outlier, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian menjadi 92 observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
KK (Y)	0.26	0.23	0.79	0.11	0.12
PAD (X1)	529.19	398.03	2,353.06	156.27	379.23
SILPA (X2)	316.72	224.55	3,217.80	24.19	474.14

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

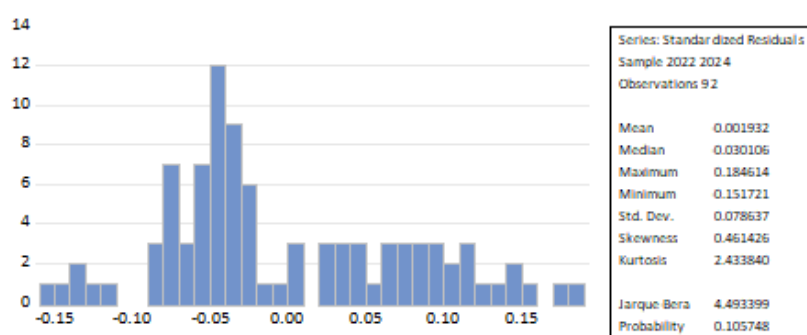
Berdasarkan Tabel 1, variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (KK) memiliki nilai minimum 0,11 dan maksimum 0,79, dengan nilai rata-rata 0,26 serta standar deviasi sebesar 0,12. Nilai tersebut menunjukkan adanya variasi kinerja keuangan selama periode penelitian. Kemudian Variabel PAD memiliki nilai minimum 156,27 dan maksimum 2.353,06, dengan nilai rata-rata 529,19 dan standar deviasi sebesar 379,23. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang cukup besar menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menghasilkan PAD masih berbeda-beda. Hal tersebut menggambarkan adanya ketimpangan kapasitas penerimaan daerah antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu, variabel SILPA memiliki nilai minimum 24,19 dan maksimum 3.217,80, dengan nilai rata-rata 316,72 dan standar deviasi sebesar 474,14. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan rata-ratanya menunjukkan bahwa SILPA memiliki variasi yang relatif tinggi antar pemerintah daerah selama periode penelitian.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga alternatif model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model*

(REM). Untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian, dilakukan pengujian melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Hasil Uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, model FEM dinilai lebih sesuai untuk digunakan dibandingkan CEM. Selanjutnya, Uji *Hausman* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0569, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga model REM dipilih sebagai model yang lebih tepat dibandingkan FEM. Hasil tersebut diperkuat oleh Uji *Lagrange Multiplier* yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, model REM merupakan pendekatan yang digunakan dalam analisis regresi data panel penelitian ini.

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 4,493399 dengan probabilitas sebesar 0,105748. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 residual dalam model dapat dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, model penelitian tidak mengalami permasalahan normalitas residual.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	SILPA
PAD	1.000000	0.287425
SILPA	0.287425	1.000000

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai korelasi antara PAD dan SILPA sebesar 0,287425. Nilai tersebut berada di bawah batas 0,80, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel independen PAD dan SILPA dalam model penelitian. Dengan demikian, kedua variabel independen dapat digunakan dalam analisis regresi data panel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
C	0.0000
PAD	0.1100
SILPA	0.5043

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas, nilai probabilitas variabel PAD sebesar 0,1100 dan SILPA sebesar 0,5043. Kedua dari nilai probabilitas tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.564786	Mean dependent var	0.033160
Adjusted R-squared	0.555006	S.D. dependent var	0.025152
S.E. of regression	0.016610	Sum squared resid	0.024554
F-statistic	5.774.856	Durbin-Watson stat	1.726.301
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil REM, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,726301 pada *weighted statistics*. Dari tabel distribusi *Durbin-Watson* diperoleh nilai $dL = 1,6166$ dan $dU = 1,7053$. Selanjutnya, nilai batas atas untuk autokorelasi negatif adalah $4 - dU = 2,2947$ dan $4 - dL = 2,3834$. Karena nilai DW berada pada interval $dU < DW < 4 - dU$, yaitu $1,7053 < 1,726301 < 2,2947$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient
C	0.142216
PAD	0.000241
SILPA	-9.86E-06

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

$$KK = 0,142216 + 0,000241 \text{ PAD} - 0,00000986 \text{ SILPA} + e$$

Hasil estimasi regresi menunjukka nilai konstanta sebesar 0,142216. Artinya apabila variabel PAD dan SILPA diasumsikan tidak mengalami perubahan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,142216. Sementara itu, koefisien PAD sebesar 0,000241 menunjukkan hubungan positif, dan koefisien SILPA sebesar -0,00000986 menunjukkan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 6. Hasil Uji Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.564786	Mean dependent var	0.033160
Adjusted R-squared	0.555006	S.D. dependent var	0.025152
S.E. of regression	0.016610	Sum squared resid	0.024554
F-statistic	5.774.856	Durbin-Watson stat	1.726.301
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Hasil estimasi *Random Effect Model* menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,555006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD dan SILPA mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 55,50%, sedangkan 44,50% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang di luar model penelitian.

Tabel 7. Uji parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142216	0.018486	7.692.959	0.0000
PAD	0.000241	2.20E-05	1.095.204	0.0000
SILPA	-9.86E-06	1.30E-05	-0.760439	0.4490

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 7, PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,000241. Maka, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD juga diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, SILPA memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4490 yang dimana lebih besar dari 0,05. Meskipun koefisien SILPA bernilai negatif sebesar -0,00000986, pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 8. Uji Simultan

R-squared	0.564786	Mean dependent var	0.033160
Adjusted R-squared	0.555006	S.D. dependent var	0.025152
S.E. of regression	0.016610	Sum squared resid	0.024554
F-statistic	5.774.856	Durbin-Watson stat	1.726.301
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai F-statistic sebesar 57,748560 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga PAD dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,000-241 dengan nilai probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini konsisten dengan teori keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agen yang mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber ekonomi daerahnya sendiri akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer, sehingga rasio kemandirian dan kinerja keuangannya meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra dan Kurniawati (2026), Mulia dan Widiatmoko (2025), Pradana dan Handayani (2023), serta Hastuti dan Nasution (2024) yang juga menemukan pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber PAD lainnya, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel SILPA memiliki koefisien sebesar -0,00000986 dengan nilai probabilitas 0,4490. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Arah koefisien yang negatif namun tidak signifikan mengindikasikan bahwa besar kecilnya SILPA tidak secara langsung memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini dapat dijelaskan karena SILPA pada dasarnya mencerminkan sisa dana yang belum terserap atau belum dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. Sebagian besar SILPA daerah kabupaten/kota di Jawa Timur kemungkinan juga bersumber dari sisa dana transfer maupun sisa belanja rutin yang tidak terealisasi, sehingga tidak berkaitan langsung dengan komposisi PAD yang menjadi basis perhitungan rasio kemandirian. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Putri dan Ratnawati (2023) yang juga menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian Fitriani dan Syarif (2025) serta Ratnasari dan Meirini (2022) yang menemukan pengaruh signifikan SILPA terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan proksi pengukuran kinerja keuangan, periode pengamatan, maupun karakteristik fiskal wilayah penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024, penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, SILPA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, PAD dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD menjadi faktor yang lebih penting dalam mendorong kemandirian keuangan dibandingkan dengan besarnya SILPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Alainin, I., & Maulidia, R. (2026). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Dan Silpa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 134-142.
- Angraini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.737>
- Aryasandi, F. I., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan Ekonomin Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *AL Kharaj*, 6, 7030–7043. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3752>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, September 2021, 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v1i102.190>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 445-455.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *Economics and Financial*, 7(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Stydi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 157–170. <https://doi.org/10.30596/21423>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah MEA*

(*Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*), 9(1), 2142–2161. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5377>

Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 22, 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>

Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>

Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>.

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17, 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>

Rustiyani, N., & Barus, I. S. L. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 250–266. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.167>

Saputra, A. D., & Kurniawati, L. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4). <https://doi.org/10.17509/ijdb.v5i4.97217>